

CATRA

Mengayomi & Mencerdaskan

MAJALAH WANTANNAS RI



EDISI XXXVI

TAJUK UTAMA

**Globalisasi Budaya Asing VS
Ketahanan Budaya Nasional**



INFO KITA

**Setjen Wantannas: "Indonesia
Butuh Pemimpin-Pemimpin
Nasional Yang Berjiwa Besar"**

**Wantannas Bahas 4 Rancangan
Strategis Permasalahan Bangsa
Dalam Pra Sidang Ke-3 Tahun 2022**



74TH

SELAMAT HARI BELA NEGARA

19 DESEMBER 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga majalah Catra edisi XXXIV/2022 dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Majalah ini merupakan bentuk penyampaian informasi, pengetahuan maupun wawasan. Sejalan dengan itu, artikel yang disajikan pada penerbitan majalah Catra edisi XXXVI/2022 ini dengan topik utama yaitu Globalisasi Budaya Asing VS Ketahanan Budaya Nasional dilengkapi dengan topik menarik seperti Opini : Emisi Karbon Permasalahan dan Penanggulangannya juga membahas Difabel dan Hak-Hak Mereka, Info Kita: KSetjen Wantannas: "Indonesia Butuh Pemimpin-Pemimpin Nasional Yang Berjiwa Besar", PSetjen Wantannas Kunjungan Kerja ke Lampung Bela Negara Era Society 5.0, Wantannas Bahas 4 Rancangan Strategis Permasalahan Bangsa Dalam Pra Sidang Ke-3 Tahun 2022, dan Rubrik Kebijakan Pemerintah membahas Perpres 122/2022 Ditandatangani, Pembangunan Pembangkit Listrik Rendah Emisi Dimulai, sejalan dengan kebijakan tersebut, Rubrik Tahukah Anda membahas Energi Baru Terbarukan Tidak Lagi Menjadi Energi Alternatif. Selamat Membaca!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pelindung: Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.(Opsla) Penanggung Jawab: Kepala Biro Persidangan Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I. Redaktur: Kolonel Arh Abdul Cholik, S.H., M.H. Penyunting/Editor: Desi Fajar Nita, S. Sos., Natalina Pakpahan, S.I.Kom Desain Grafis: Riza Savitri, A.Md., Fauziah Nurunnajmi, S.E Fotografer: Purwanto, Kiswanto Redaksi: Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat – 10110, Telp. 0213863983 Fax 021-3441683, email: dangmas@wantannas.go.id; dangmaswantannas@gmail.com;

DAFTAR ISI

TAJUK UTAMA :

- Globalisasi Budaya Asing VS Ketahanan Budaya Nasional.....4

INFO KITA :

- Setjen Wantannas: "Indonesia Butuh Pemimpin-Pemimpin Nasional Yang Berjiwa Besar".....8
- Sesjen Wantannas Mengisi Kuliah Umum Di UN-AND Padang.....9
- Setjen Wantannas Kunjungan Kerja ke Lampung Bela Negara Era Society 5.0.....10
- Wantannas Bahas 4 Rancangan Strategis Permasalahan Bangsa Dalam Pra Sidang Ke-3 Tahun 202212

OPINI :

- *Emisi Karbon Permasalahan dan Penanggulangannya*.....14
- *Difabel dan Hak-Hak Mereka*.....17
- *Peran Penting Psikologi dalam Perilaku Organisasi*20

KEBIJAKAN PEMERINTAH :

- Perpres 122/2022 Ditandatangani, Pembangunan Pembangkit Listrik Rendah Emisi Dimulai.....22

TAHUKAH ANDA :

- *Energi Baru Terbarukan Tidak Lagi Menjadi Energi Alternatif*.....24
- *Hari Kesehatan Nasional 2022*.....26

Inspirasi Bulan Ini



Ada seorang tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengar dengan seksama, lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk perlahan, "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya?" ujar pak tua

"Pahit sekali....." Jawab pemuda itu.

Pak tua itu tersenyum, mengajak pemuda itu untuk berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang itu. Dengan menggunakan sepotong kayu, ia mengaduknya.

"Coba ambir air dari danau itu dan minumlah"

Saat si pemuda mereguk air itu, pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya...?"

"Segar...." sahut si pemuda....

"Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu?" tanya pak tua itu

"Tidak...." sahut pemuda itu. Pak tua itu tertawa sambil berkata,

"Anak muda..." Dengarkan baik-baik, pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama.

Tapi "INGAT.." kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki.

*Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang kita dapat lakukan:

"Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu" Hati kita adalah wadah itu.

Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yg besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu serta merubahnya menjadi kesegaran dan kedamai.



GLOBALISASI BUDAYA ASING VS KETAHANAN BUDAYA NASIONAL

Oleh : Syamsu Khoirudin

Seiring dengan kian pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, arus globalisasi tidak dapat terelakkan lagi terus menyebar ke segenap penjuru dunia. Penyebarannya berlangsung secara cepat dan meluas, tak terbatas pada negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga melintasi batas negara-negara berkembang dan miskin dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan derasnya arus globalisasi merupakan dua proses yang saling terkait satu sama lain. Keduanya saling mendukung. Tak ada globalisasi tanpa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Globalisasi dapat diartikan sebagai integrasi perekonomian, budaya, politik dan perkembangan teknologi yang sangat maju sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi. Salah satu aspek globalisasi yang berpengaruh yaitu aspek budaya suatu negara dengan negara lainnya. Globalisasi menjadi faktor pendukung dari munculnya budaya baru pada sebuah negara. Migrasi dari satu tempat ke tempat lain tidak lagi dibutuhkan untuk membawa suatu kebudayaan berpindah, hanya dengan mengakses internet kebudayaan dari negara lain dapat diserap oleh pengguna, munculnya “ruang elektronik” dalam kehidupan secara meluas menyebabkan hilangnya pros-

es “social learning” yang memungkinkan empati dilakukan dalam hubungan antar manusia. Media juga mengambil bagian pada pengaruh penyebaran budaya asing yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi budaya lokal. Budaya asing yang berasal dari luar baik budaya barat maupun budaya timur masuk ke Indonesia begitu sangat mudah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Fenomena masuknya budaya asing yang mempengaruhi budaya kita dapat terlihat pada berbagai bidang misalnya pada bidang musik, film/drama, fashion, tarian, kuliner dan lain lain.

Dalam bidang musik, budaya barat terlihat mendominasi dunia musik Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya aliran musik barat yang masuk ke Indonesia, contohnya yaitu musik rafa, rock n roll, reggae, remix, dan sebagainya. Selain budaya barat, Indonesia yang saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan rumah bagi jutaan penggemar musik pop korea atau sering disebut dengan istilah K-Pop. Pada tahun 2021, Twitter merilis laporan bahwa dari 1 Juli 2020 hingga 30 Juni 2021 terdapat lebih dari 7 miliar tweet yang mengandung kata kunci K-Pop. Menurut laporan tersebut, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah tweet dan unique authors paling banyak tentang K-Pop di Twitter. Di posisi kedua terdapat negara Filipina, sedangkan di peringkat ketiga ditempati oleh Thailand. Sementara itu, negara asal K-Pop sendiri yaitu Korea Se-

latan justru menempati posisi ke-4. Selain data yang dirilis oleh twitter, Media massa Korea Selatan The JoongAng pada tahun 2022 merilis daftar 10 negara dengan penonton YouTube terbanyak untuk video grup dan solois musik pop Korea. Dalam daftar tersebut Indonesia selalu masuk pada 5 besar negara dengan jumlah penonton you tube K-Pop terbanyak sedangkan negara asal K-Pop sendiri yaitu Korea Selatan tidak masuk pada 5 besar. Misalnya untuk Grup BTS menjadi yang paling banyak mengumpulkan jumlah total view dengan angka 15,1 miliar dimana Indonesia menempati peringkat ketiga penonton you tube BTS terbanyak setelah Jepang dan India yaitu dengan 1,5 milyar penonton.

Pada bidang perfilman, kita bisa melihat bahwa masyarakat kita begitu sangat gemar film, drama maupun tv show produk dari luar negeri. Pada awal tahun 2022, JustWatch merilis daftar film dan TV Show yang paling populer di platformnya. JustWatch adalah sebuah layanan streaming internasional yang tersedia di 84 negara termasuk Indonesia, seperti Netflix, DisneyPlus, dan lainnya, layanan ini juga menyediakan film dan tayangan dari berbagai negara untuk penonton Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh JustWatch, terdapat daftar Top 10 film yang banyak ditonton oleh penggunanya di Indonesia pada tahun 2021. Film tahun 2021 yang paling digemari oleh penonton di Indonesia yaitu The Suicide Squad, Nobody, Zack Snyder’s Justice League,



TAJUK UTAMA



A Quiet Place Part II, dan lain lain yang kesemuanya adalah film produk luar negeri. Selain film film barat, saat ini juga sedang mewabah film dan drama korea yang begitu disukai masyarakat Indonesia. Menurut Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) pada tahun 2021, Indonesia menjadi negara ke-4 tertinggi di dunia yang paling tertarik dengan Korean Wave (gelombang budaya korea/Halyu). Bahkan, satu dari dua orang Indonesia menyukai hal hal yang berbau Korea, mulai dari film, drama, musik, dan acara hiburan lainnya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei pada tanggal 16-18 April 2020 untuk melihat peningkatan penggemar drama Korea selama pandemi. Di antara 924 responden, 842 responden atau 91 persen mengaku menonton K-Drama selama pandemi COVID-19, data ini menunjukkan bahwa penggemar drama korea di Indonesia begitu sangat tinggi.

Pada bidang fashion, banyak pakaian pakaian model barat di Indonesia, seperti gaun, bikini, dress, dan lain sebagainya yang diterima dan diikuti oleh masyarakat Indonesia dan pakaian tersebut dijadikan sebagai pakaian sehari-hari. Model fashion Korea juga banyak diti-

ru oleh masyarakat Indonesia khususnya para remaja yang meniru para artis Korea idola mereka. Para remaja menjadikan Korean Style sebagai salah satu referensi gaya berpakaian. Tarian-tarian barat juga mulai berkembang di Indonesia, seperti breakdance, tango, waltz, cha-cha, dan balet. Selain tari tarian barat, Modern dance korea saat ini juga digandrungi oleh para remaja Indonesia, tarian ini berpadu dengan musik pop korea yang dibawakan oleh para artis korea.

Gambaran kondisi diatas menunjukkan bahwa budaya asing telah begitu massif masuk ke Indonesia dan mempengaruhi budaya masyarakat kita. Mudahnya akulturasi budaya asing yang masuk ke Indonesia dan merubah budaya masyarakat Indonesia salah satu penyebabnya adalah karena kurang selektifnya masyarakat dalam memilih dan memilih budaya budaya asing yang masuk. Masyarakat cenderung apatis untuk melakukan seleksi secara bijaksana apakah budaya budaya asing tersebut selaras dengan nilai nilai luhur bangsa Indonesia dan apakah budaya budaya tersebut tidak memberikan pengaruh negatif pada perilaku masyarakat yang dapat berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Kurang selektifnya mas-

TAJUK UTAMA

asyarakat dalam memfilter budaya asing yang masuk banyak terjadi khususnya pada anak anak remaja. Remaja saat ini begitu mudah menyerap pengaruh budaya asing dan menjadikan budaya asing sebagai sebuah trend baru budaya yang kekinian dan membanggakan bagi mereka. Remaja mulai melupakan dan meninggalkan budaya budaya lokal. Muncul pandangan pada mereka bahwa mempelajari dan melestarikan budaya budaya lokal menjadi hal yang tidak modern, tidak milenial dan bukan sesuatu yang dapat dibanggakan dan bahkan sebagian merasa malu untuk melakukannya. Kecintaan pada budaya lokal semakin tergerus seiring dengan derasnya arus globalisasi.

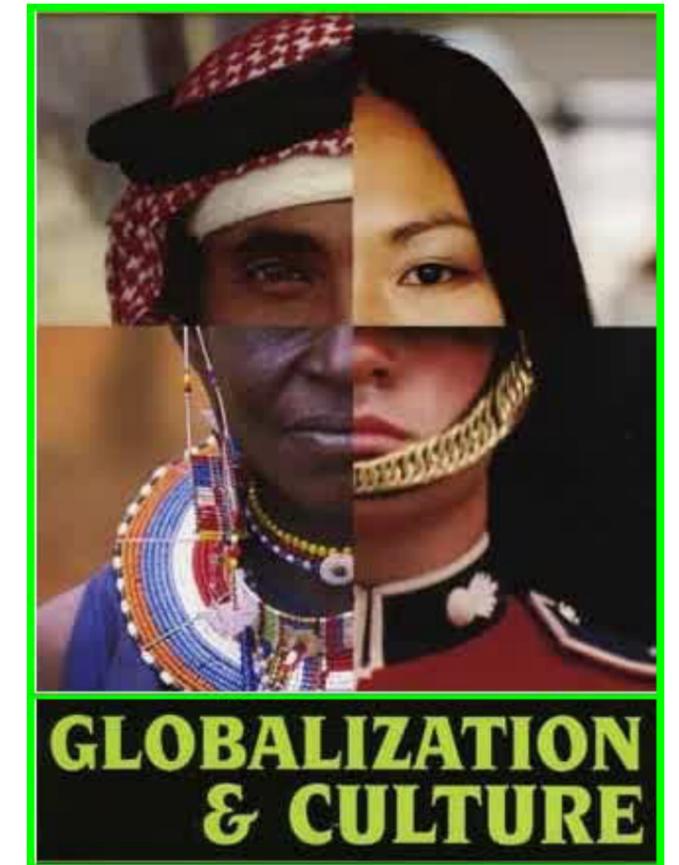
Kecintaan akan budaya nasional yang bersumber dari budaya budaya lokal yang berkembang di seluruh pelosok wilayah tanah air semakin menipis. Hal ini disebabkan selain karena faktor eksternal dari masifnya budaya asing yang masuk karena arus globalisasi tetapi juga karena ada faktor internal yaitu kurangnya penanaman nilai nilai kecintaan pada budaya nasional sejak dini. Penanaman kecintaan nilai nilai budaya nasional akan dapat meningkatkan ketahanan budaya nasional. Para remaja sejak dini harus terus ditanamkan nilai nilai tersebut baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Sistem pendidikan formal seyogyanya mengakomodir pelaksanaan penanaman nilai nilai tersebut baik pada level pendidikan dasar maupun pendidikan menengah yang diatur dalam kurikulum pendidikan tersebut.

Derasnya budaya asing yang masuk ke Indonesia dan selanjutnya diadopsi oleh masyarakat sebagai budaya baru yang menjadi trend pola perilaku masyarakat telah memberikan dampak yang berpengaruh pada sendi sendi kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat secara selektif dan bijaksana dalam mengadopsi budaya asing yang masuk maka hal tersebut dapat membawa dampak yang positif. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari adopsi budaya baru tersebut. Akan tetapi apabila masyarakat tidak mampu memfilter dengan baik budaya asing tersebut dan hanya mengadopsi secara penuh tanpa melakukan seleksi secara bijaksana, maka pengaruh budaya asing tersebut akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak negatif tersebut akan berpengaruh pada sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada semua aspek Ipoleksosbudhankam, dan apabila hal ini

dibiarkan saja tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah yang efektif maka akan berpengaruh pada tingkat ketahanan nasional.

Di era globalisasi dengan segala kemajuan teknologi yang begitu cepat, ternyata memberikan dampak terhadap bentuk ancaman pada suatu bangsa dan negara yang tadinya dari bentuk ancaman tradisional beralih menjadi non tradisional. Teori geopolitik dipersepsikan untuk penguasaan ruang hidup secara fisik, namun dengan perkembangan saat ini dikembangkan lebih luas termasuk ditentukan oleh kemampuan mempertahankan dan membentengi diri dari hegemoni penguasaan secara non fisik yaitu salah satunya adalah kebudayaan.

Samuel P Huntington dalam bukunya the Clash of Civilization, mengatakan dalam peradaban kehidupan global akan terjadi benturan kebudayaan, di mana antar kebudayaan saling melumat dan menghancurkan kebudayaan lain. Benturan akan melahirkan pemenang dimana kebudayaan yang kalah akan tersingkir dan akhirnya lenyap dari muka bumi. Tesis ini menekankan bahwa globalisasi budaya menjadi suatu hal yang tidak terelakkan sehingga diperlukan suatu ketahanan budaya nasional dalam menghadapi pengaruh globalisasi budaya asing.





Sesjen Wantannas : “Indonesia butuh pemimpin-pemimpin nasional yang berjiwa besar”

Oleh : Novira Khairunnisa

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Wantannas Laksamana Madya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla menjadi pembicara dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kedua dan sekaligus Musyawarah Nasional (Munas) pertama yang diadakan oleh Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), di Hotel Golden Boutique pada tanggal 8-10 Desember 2022.

Sesjen Wantannas Harjo Susmoro menyampaikan mengenai bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, serta apa saja ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mewujudkannya. Dalam menghadapi ancaman, tantangan dan peluang era 5.0 serta globalisasi, dibutuhkan SDM yang unggul dengan keuletan dan ketangguhan yang tinggi. Munculnya Paradigma baru yang lebih pragmatis dan materialistis, menipisnya standar kultural dan religius menjadi

gaya hidup yang lebih praktis dan rasionalis di era ini.

Sesjen Wantannas menyampaikan pentingnya bagi rakyat Indonesia untuk memiliki Jiwa Bela Negara. “Dibutuhkan seorang negarawan dan orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk melaksanakan upaya belajar negara yang berpegang kepada empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan Wawasan Kebangsaan sebagai Aksi Gerakan Bela Negara diberikan kepada ABPEDNAS Indonesia yang merupakan wadah aspirasi seluruh BPD untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan desa yang baik. Melalui Munas ini diharapkan manajemen mutu dirasakan bagi anggotanya. Beberapa kerjasama akan terus ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota dan dapat dirasakan manfaat bagi warga desa sekitarnya.



SESJEN WANTANNAS MENGISI KULIAH UMUM DI UNAND PADANG

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla memberikan kuliah umum dihadapan civitas akademisi Universitas Andalas (Unand) Padang di ruang senat, Selasa (20/11/2022).

Harjo Susmoro dalam pemaparannya mengatakan, Indonesia sebagai negara maritim, juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki berbagai keuntungan, antara lain posisi geografis yang diapit dua benua dan dua samudra, yang merupakan perlintasan jalur perdagangan. Di samping itu memiliki sumber daya alam melimpah.

Ia juga menjelaskan, tantangan yang dihadapi yaitu tegaknya kedaulatan dan hukum untuk menjaga kepentingan nasional. Serta menjaga stabilitas keamanan, pengelolaan sumber daya alam, konektivitas untuk menjamin keutuhan NKRI, sehingga tercapainya tujuan nasional dan kepentingan nasional. Salah satu tantangan lainnya yaitu era globalisasi

saat ini.

“Salah satu ancaman nyata yaitu disintegrasi, jauh dari nilai-nilai Pancasila, rendahnya pendidikan dan kurangnya literasi,” ujarnya.

Sesjen Wantannas ini menegaskan, diperlukan stabilitas keamanan yang tinggi sebagai syarat terwujudnya kepentingan nasional. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan wawasan kebangsaan, cara yang bisa dilakukan dengan memahami dan mengimplementasikan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Di samping itu, perguruan tinggi juga memiliki peran melalui tri dharma perguruan tinggi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kuliah umum ini dilaksanakan di ruang senat Universitas Andalas (Unand) Padang yang dihadiri oleh pejabat di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional, pimpinan Unand, serta dosen dan mahasiswa di lingkungan Unand.



Setjen Wantannas Kunjungan Kerja ke Lampung Bahas Bela Negara Era Society 5.0

Oleh : Natalina

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Harjo Susmoro Laksamana Madya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla bersama tim melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim bertempat di Ruang Rapat Utama, Rabu (09/11/2022).

Kegiatan Kunjungan Kerja Dewan Ketahanan Nasional kali ini mengusung tema tentang 'Peningkatan Kesadaran Bela Negara Menghadapi Era Society 5.0 Dalam Rangka Keamanan Nasional'.

Wakil Gubernur Chusnunia menyampaikan ucapan selamat datang kepada

Kepala Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Bapak Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susnoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla beserta Tim di Provinsi Lampung.

"Ini merupakan suatu kehormatan dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terimakasih dan menyambut baik, mendukung kegiatan kerja Dewan Ketahanan Nasional, dalam konteks bersama-sama meningkatkan kesadaran bela negara di era society 5.0," ungkapnya.

Upaya bela Negara pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan hak dan kewajiban seluruh warga negara, sehingga dalam hal ini diharapkan partisipasi dan kesadaran seluruh warga dalam konteks bela

negara.

Strategi pertahanan negara Indonesia menggunakan strategi pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Upaya ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Diakhir sambutannya Wagub berharap hal ini dapat menumbuhkan rasa kesadaran bela negara kepada generasi penerus bangsa.

"Jangan pernah sampai lepas kesadaran mencintai negara ini, kesadaran untuk membela negara ini di generasi-generasi muda kita dan generasi selanjutnya. Melalui pertemuan ini juga saya berharap ini menjadi momentum untuk kita bersama-sama terus menjaga endurance, semangat untuk saling menyemangati dan mengingatkan atas kesadaran bela negara," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Harjo Susmoro dalam kesempatan ini juga menyampaikan ungkapan terima kasih dan maksud tujuannya atas kunjungannya di provinsi

Lampung,

"Dengan bela negara saat ini sudah semakin kompleks dan tidak sama dengan bela negara jaman-jaman sebelum. Saya berterima kepada ibu Wagub dan masyarakat Lampung untuk bisa menerima kami, ini sebenarnya bukan berarti kurang, justru ini akan menjadi base marking sebagaimana Lampung ini menjalankan bela negara secara total", ucapnya.

"Kami akan menjadikan Lampung sebagai contoh kepada yang lain. Apabila ada yang kurang kita akan berikan masukan, cari solusinya dan laporkan kepada presiden berupa rekomendasi-rekomendasi mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi era society 5.0," lanjutnya.

Hadir dalam Acara tersebut, Bupati Lampung Timur, Forkopimda Provinsi Lampung, Forkopimda Lampung Timur, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.





WANTANNAS BAHAS 4 RANCANGAN STRATEGIS PERMASALAHAN BANGSA DALAM RAPAT PRA SIDANG KE-3 TAHUN 2022

Oleh : Natalina

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksamana Madya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla kembali melaksanakan kegiatan Prasadang Ke-3 dengan tema Penyempurnaan Naskah Akademik Dewan Ketahanan Nasional. Berlangsung di Ruang Nakula Kantor Kemenko Pulhukam RI Jakarta Selasa (22/11).

Dalam sambutannya, Setjen Wantannas Harjo Susmoro menyampaikan bahwa persoalan negara yang semakin kompleks tidak bisa diselesaikan lagi secara parsial oleh kementerian/lembaga tertentu, diperlukan kerjasama secara holistik dan sinergi. Ancaman negara tidak hanya ancaman dalam negeri saja termasuk ancaman human secu-

rity, ancaman terhadap kelaparan, ancaman terhadap kemiskinan, ancaman terhadap manusia, yang mana apabila ancaman ini tidak diselesaikan secara komprehensif akan mengancam eksistensi negara.

Pra Sidang ke-3 tahun 2022 ini membahas 4 materi, Yang pertama berkaitan dengan disparitas harga, adanya kesenjangan harga bahan pokok yang sangat mencolok yang disebabkan impor ilegal seperti penyeludupan juga disebabkan distribusi yang tidak merata di seluruh tanah air. Pemerintah memiliki program poros maritim dunia untuk mengembangkan tol laut tapi sampai dengan sekarang poros maritim dunia sesuai visi pemerintah yang dicanangkan sejak tahun 2014 dan sekarang tahun 2022 sudah 8 tahun ber-

jalan namun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Salah satu bukti pembangunan konektivitas melalui tol laut belum berjalan sesuai yang kita harapkan. Jika masalah disparitas harga ini tidak diselesaikan maka akan muncul rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, oleh karena itu dibahas bagaimana mengatasi disparitas harga ini.

Kedua berkaitan dengan energi, minyak bumi yang saat ini semakin menipis dan beberapa negara yang dulunya lebih memilih impor minyak saat ini mulai menggunakan minyak sebagai senjata untuk kepentingannya sehingga harga minyak bumi semakin tidak terkendali. Indonesia ternyata memiliki potensi energi panas bumi yang cukup signifikan sekitar 40% panas dunia ada di Indonesia, namun belum mampu mengoptimalkan potensi ini sebagai alternatif energi. Untuk masalah ketiga, ini masalah institusi keamanan, masalah keempat terkait poros maritim dunia, visi ini sudah dicanangkan sejak tahun 2014 namun sampai sekarang implementasi tugas-tugas K/L belum sepenuhnya diarahkan mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, potret poros maritim dunia sudah dikeluarkan melalui kebijakan Kelautan Indonesia namun belum seperti yang diharapkan hasilnya, untuk itu perlu disampaikan langkah-langkah strategis dan konkret kepa-

da Presiden.

“Untuk strategi-strategi ini merupakan Strategi Ketahanan Nasional (SKN) yang sampai saat ini belum ada dokumen resminya, Wantannas sudah menyusun SKN pada tahun 2021 namun belum ditandatangani dan ditindaklanjuti Presiden,” ungkap Sesjen Wantannas.

Indra Sugiarsih Asisten Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet menyampaikan dalam tanggapannya menyampaikan terkait topik “Optimalisasi Program Tol Laut Terhadap Penurunan Disparitas Harga Guna Mencegah Impor Ilegal Dalam Rangka Keamanan Nasional”, perlu diperhatikan bahwa Presiden dalam 6 tahun terakhir setidaknya-tidaknya telah memberikan arah kebijakan pada 4 forum berbeda, terakhir dalam rapat terbatas tanggal 5 Maret 2020 tentang Akselerasi Program Tol Laut. Tol laut ini modalnya besar karena mengangkut hasil sentra-sentra usaha dan logistik dari Jawa ke daerah, namun saat pulang kapal-kapal kosong karena tidak ada hasil sentra yang dibawa sehingga biaya operasionalnya mahal.

Kegiatan Pra Sidang Dewan ke-3 berjalan dengan baik dan tertib dihadiri oleh 23 perwakilan kementerian/lembaga secara tatap muka dan 42 peserta undangan internal dan eksternal melalui virtual zoom meeting.





EMISI KARBON: PERMASALAHAN DAN PENAGGGULANGANNYA

Oleh : Iqbal Rafani

Dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama akhir-akhir ini, kita tengah dihadapkan pada fenomena perubahan iklim (climate change). Cuaca sulit diprediksi, misalnya kapan waktu berlangsung dan lamanya musim hujan dan musim kemarau. Bencana alam terjadi di beberapa tempat. Kearifan lokal yang jauh sebelumnya pernah dipraktikkan para leluhur kita seperti "Pranata Mangsa" khususnya untuk kegiatan bercocok tanam (pertanian), kini tinggal jadi literatur klasik.

Satu diantara perubahan iklim tersebut terkait dengan emisi karbon yang sudah menjadi perhatian global. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) mensinyalir bahwa perbuatan manusia telah meningkatkan panas dan perubahan yang cepat di lapisan atmosfer, laut, dan daratan. Salah satu indikasinya yaitu suhu bumi semakin terasa panas atau pemanasan global.

Emisi karbon

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), emisi adalah pemancaran cahaya, panas, atau elektron dari suatu permukaan benda padat atau cair. Sementara itu, karbon yaitu unsur bukan logam yang berada di atmosfer

dan memiliki peran penting dalam menyokong kehidupan.

Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, seperti karbon dioksida (CO₂), solar, gas minyak cair (LPG), dan bahan bakar lainnya. Dalam pengertian sederhana, emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Emisi karbon yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca (kemampuan atmosfer dalam menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah untuk mempertahankan suhu udara) yang berujung pada peningkatan suhu bumi secara signifikan. Oleh karena itu, emisi karbon tersebut harus dijaga dalam rangka mempertahankan suhu udara yang nyaman.

Permasalahan

Permasalahan emisi karbon sejatinya berbanding lurus dengan perkembangan kehidupan umat manusia. Utamanya berhubungan dengan penemuan dan penggunaan teknologi yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan. Salah satu tanda terjadinya emisi karbon yaitu suhu bumi terasa panas, terjadi perubahan iklim, dan pemanasan global. Berikut beberapa

contoh emisi karbon.

Kegiatan industri

Sebagian besar industri menggunakan bahan bakar fosil dan proses kimiawi yang menghasilkan emisi karbon. Sejak era industri sekitar tahun 1750-an, emisi karbon cenderung meningkat seiring dengan kemajuan industri hingga sekarang. Secara total, manusia telah menghasilkan sekitar 2.500 miliar ton emisi karbon ke atmosfer, sejak 1850 (Carbon Brief, 2022).

Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor menyumbang emisi karbon sebanyak 71 juta ton, dengan konsumsi energi sebanyak 179 juta SBM (Setara Barrel Minyak). Apalagi saat ini industri automotive berkembang dengan pesat sehingga memicu emisi karbon.

Chlorofluorocarbon (CFC)

Chlorofluorocarbon (CFC) adalah senyawa organik yang mengandung karbon, klorin, dan fluorin yang dapat menyebabkan kerusakan pada molekul lapisan ozon sebagai filter bagi masuknya radiasi ultra violet matahari. Beberapa contoh penggunaan CFC diantaranya untuk pendingin udara (AC), kulkas (refrigerator), bahan pelarut (pembersih dan pengeringan minyak pada industri elektronik), bahan pendorong (penyemprot udara), dan bahan aktif pemadam kebakaran. Semua bahan-bahan tersebut sudah marak digunakan karena praktis dan efektif, tetapi berpotensi membahayakan lingkungan terkait dengan emisi karbon.

Kebakaran hutan

Flora, fauna, sisa organisme dalam hutan mengandung karbon, sehingga secara alami hutan berfungsi sebagai penyerap emisi karbon. Jika hutan terbakar, terjadi pelepasan emisi karbon. Kebakaran hutan alami sebenarnya diperlukan oleh ekosistem. Namun, kebakaran hutan akibat ulah manusia dapat mengurangi jumlah hutan dan menghasilkan emisi karbon. Sekitar 2,6 miliar ton emisi karbon (sepertiga dari emisi karbon dari bahan bakar fosil) diserap oleh hutan setiap tahunnya. Artinya, berkurangnya jumlah hutan akan membuat kadar karbon dioksida di atmosfer terus bertambah, sehingga menyebabkan pemanasan global (International Union for Conservation of Nature, 2022).

Deforestasi

Deforestasi adalah hilangnya hutan alam beserta atributnya yang diakibatkan aktivitas

manusia terkait dengan penebangan hutan secara illegal dan tidak terstruktur seperti pembukaan lahan area pertambangan, pembangunan prasarana dan sarana pemukiman dan transportasi, pertanian, dan lain-lain. Deforestasi diperkirakan mencapai 17-20% total emisi gas rumah kaca dunia, lebih besar dari pada emisi sektor transportasi global.

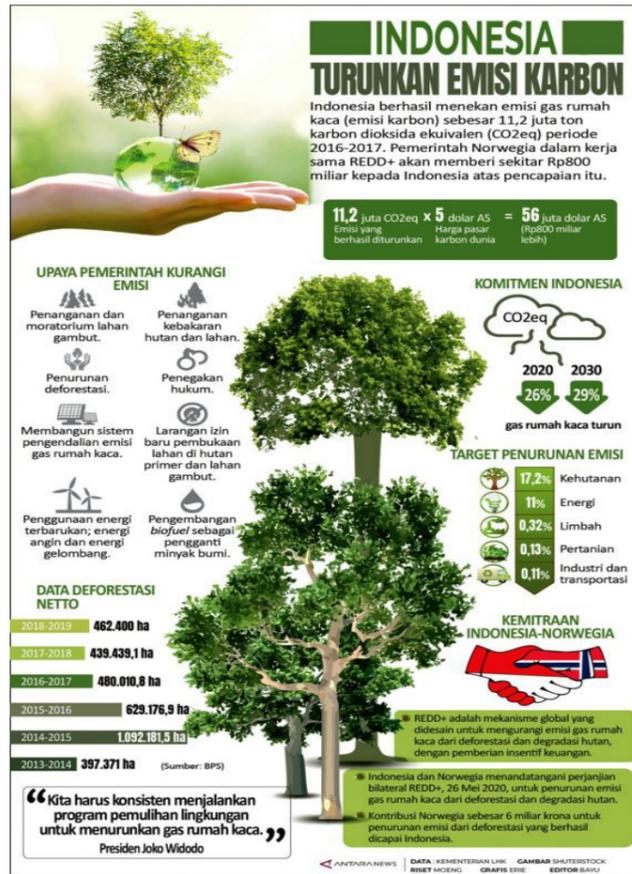
Total Emisi karbon dari pembakaran energi dan aktivitas industri dunia diperkirakan sekitar 36.23 gigaton CO₂ (Carbon Brief, 2021). Negara penyumbang terbesar adalah Tiongkok (11,94 gigaton CO₂), Amerika Serikat (4,64 gigaton CO₂), Uni Eropa (2,71 gigaton CO₂), India (2,54 gigaton CO₂), dan negara-negara lainnya (14,4 gigaton CO₂). Selama tahun 1850 hingga 2021, Amerika Serikat merupakan penyumbang terbesar, yaitu 20,3% dari total emisi karbon global. Berikutnya disusul oleh Tiongkok (11,4%), Rusia (6,9%), Brasil (4,5%), Indonesia (4,1%), Jerman (3,5%), India (3,4%), Inggris (3%), Jepang (2,7%), dan Kanada (2,6%).

Indonesia tercatat sebagai penyumbang emisi karbon, sebagian besar karena deforestasi. Sepanjang tahun 2019, sektor energi masih menjadi penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar yaitu sekitar 45.7% selain sektor FOLU (Forest and Other Land Uses) atau hutan dan penggunaan lahan. Berikutnya subsektor pembangkitan listrik (35%), serta transportasi dan industri masing-masing 27%.

Indonesia juga digadang-gadang sebagai salah satu kontributor emisi karbon, sehingga memiliki peran dan tanggung jawab yang besar pula terkait perubahan iklim termasuk mitigasi pemanasan global. Untuk mengetahui besaran emisi, maka dilakukan pengukuran jejak karbon atau jumlah emisi CO₂ yang berhubungan dengan aktivitas seseorang atau entitas lainnya. Jejak karbon memberikan dampak negatif bagi kehidupan di bumi, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan malnutrisi dan meningkatkan risiko kelaparan

Penanggulangan

Emisi karbon adalah permasalahan global sehingga penanggulangannya juga bersifat global, tanpa terkecuali. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tentang kondisi pemanasan global yang bertema mitigasi iklim, telah berupaya untuk membatasi dampak bencana iklim seperti kebakaran hutan, banjir, dan sebagainya. Sementara itu, International En-



ergy Agency (IEA), menekankan masyarakat dunia perlu mendorong investasi berkelanjutan di bidang teknologi energi baru dan terbarukan (EBT). IEA juga menegaskan bahwa dunia harus berupaya mengurangi emisi karbon pada tahun 2022, serta mengejar target nol-emisi pada tahun 2050.

Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Penganekaragaman energi, khususnya peningkatan penggunaan energi terbarukan di samping bertujuan untuk meminimalisir terjadinya efek Gas Rumah Kaca (GRK) yang berfungsi dalam menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah, juga sekaligus untuk menciptakan ketahanan energi dan ekonomi Indonesia.

Pemanfaatan EBT yang berasal dari alam yang dapat diisi kembali secara tetap, cukup menjanjikan energi bersih di masa depan. Misalnya energi surya, angin, pembangkit listrik tenaga air, panas bumi (geothermal), dan energi pasang surut permukaan air laut. Menurut Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi EBT cukup besar, antara lain mini/mikro hydro sebesar 450 mega watt, biomassa 50 giga watt, energi surya 4,80 kWh per meter persegi per hari, energi angin 3-6 meter per detik dan energi nuklir 3 giga watt. Dalam bauran energi primer

nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17% dengan komposisi bahan bakar nabati (5%), panas bumi (5%), biomassa, nuklir, air, surya, dan angin (5%), dan batu bara yang dicairkan (2%). Sebagai catatan, potensi energi panas bumi di Indonesia sekitar 23,9 giga watt, namun pemanfaatannya baru sekitar 8%. Pembangkit panas bumi dapat pula dioperasikan sampai 95% dari kapasitas terpasang dengan waktu operasi mencapai 30 tahun lebih.

Indonesia juga telah bertekad untuk mengurangi emisi karbon seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98/2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dalam pembangunan nasional. Perpres ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan sebagai pedoman pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui kebijakan, langkah, dan kegiatan untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) dan mengendalikan emis gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Akhirnya semua ini terpulang kepada kita bersama. Emisi karbon yang menyebabkan terjadinya pemanasan global tidak dapat dihentikan, tetapi dapat diperlambat. Mahatma Gandhi (1958) pernah menyatakan bahwa: “The earth has enough resources for our need but not for our greed (bumi ini cukup menyediakan untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan manusia)”. Lebih dari itu, Tuhan telah berfirman bahwa “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (QS Ar Rum: 41).

Kita harus bersikap bijak dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, termasuk terkait dengan permasalahan dan penanggulangan emisi karbon, sebagai refleksi terhadap rahmatan lil ‘alamin. Sekaligus hal tersebut selaras dengan sikap dan tindakan rasa syukur kita terhadap rahmat dan karunia Yang Maha Kuasa sesuai dengan firmanNya, yaitu “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS Ar Rahman: 55). Kita harus menanamkan dan sekaligus mempraktikkan spirit “hablumminallah (hubungan baik dengan Allah)”, “hablumminannas (hubungan baik dengan sesama manusia), dan “hablumminalalam (hubungan baik dengan alam). Mari kita jaga alam – alam akan jaga kita.



DIFABEL, DAN HAK – HAK MEREKA DALAM MEMPEROLEH LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Oleh : Desi Fajar Nita

Setiap tanggal 3 Desember masyarakat dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mengapa disebut disabilitas? Karena istilah penyandang cacat sekarang sudah tidak digunakan lagi. Pada Konferensi Ketunanetraan Asia di Singapura pada 1981 yang diselenggarakan oleh International Federation of The Blind (IFB) dan World Council for the Welfare of The Blind (WCWB), istilah diffabled mulai diperkenalkan dan dialihbahasakan menjadi difabel. Di kalangan masyarakat sendiri, istilah difabel amat cepat populer karena lebih ramah, egaliter, menghargai, dan memancarkan spirit keberpihakan. Hari Disabilitas Internasional diperingati dalam rangka mengembangkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap difabel. Kepedulian pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi martabat, membela hak-hak, serta memperjuangkan kesejahteraan difabel.

Sejalan dengan pesan resolusi PBB ketika mencanangkan Hari Disabilitas Internasional, pemerintah dan semua elemen masyarakat perlu meningkatkan keberpihakan terhadap difabel. Kaum difabel, baik karena bawaan lahir atau karena mengalami musibah dan kecelakaan, sebetulnya tidak menuntut belas-kasih, tetapi yang dibutuhkan adalah pengertian dan dihargai sebagai manusia dengan segala kelebihan dan keterbatasannya.

Bahkan, dalam ajaran agama manapun dan nilai-nilai kemanusiaan juga tidak mentolerir perilaku memandang rendah apalagi mengucilkan di-

fabel. Namun dalam kenyataan sehari-hari, seperti di dunia kerja, masih banyak pihak yang diskriminatif atau sekurangnya meremehkan kemampuan kerja difabel. Di sebagian masyarakat masih terdapat persepsi yang tidak memberi suasana kondusif kepada difabel. Bahkan tidak jarang anak yang terlahir difabel dianggap yang memalukan.

Penyandang Disabilitas atau difabel menjadi salah satu kelompok rentan yang sering dilupakan, sehingga pengaturan kehidupan mereka belum maksimal sesuai dengan hak - haknya, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan layanan komunikasi dan informasi publik. Di samping itu, belum adanya regulasi yang mengatur pemenuhan layanan komunikasi dan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas seakan – akan ikut mengenyampingkan hak – hak mereka.

Regulasi selama ini yang melindungi kaum disabilitas hanyalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Sedangkan pemenuhan Hak Layanan Komunikasi dan Informasi bagi Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi karena belum adanya pemahaman terhadap penyedia Layanan Komunikasi dan Informasi Publik bagi

penyandang disabilitas sesuai dengan ragamnya. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Amanat UUD 1945 Pasal 28 F yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Entitas penyandang disabilitas juga diatur UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Negara Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya. Layanan Komunikasi dan Informasi Publik merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi. Mereka memiliki kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai WNI lainnya. Mereka juga bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang berhak untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Oleh karena itu, negara perlu menjamin kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dengan memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara maupun kemasyarakatan.

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama, non diskriminasi, mendapat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemberdayaan, Aksesibilitas, Akomodasi yang layak dalam rangka sebagai pemenuhan hak. Adapun Hak Penyandang Disabilitas antara lain hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, mendapatkan pelayanan publik, aksesibilitas pendidikan serta pekerjaan, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hidup bermasyarakat, dan lain sebagainya.

Pemenuhan pelayanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban pemerintah khususnya bidang informasi dan komunikasi publik. Permasalahan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi dan komunikasi publik antara lain pengecualian mereka dari aksesibilitas terhadap informasi, misalnya minimnya informasi bagi disabilitas dalam kondisi pandemi sehingga menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan akses informasi.

Di sisi lain, kaum disabilitas pun kerap dianggap sebagai beban atau masalah. Keadaan seperti ini sempat berkembang seiring dengan adanya revolusi industri, dimana pemikiran kaum kapitalis liberal yang selalu melakukan proses akumulasi modal dengan menggunakan manusia sebagai sumber daya dan investasi atau sebagai modal. Dalam cara pandang itu, penyandang disabilitas mulai tersingkirkan karena tidak dapat dijadikan

sebagai investasi atau modal untuk mengakumulasi keuntungan, tidak mempunyai nilai-nilai produktif, efektif, dan efisien yang merupakan parameter untuk orang - orang yang dapat digolongkan sebagai sumber daya, investasi ataupun modal. Hal ini mengakibatkan pemberian fasilitas kepada kaum yang memiliki perbedaan tersebut harus diperhitungkan dulu untung dan ruginya. Apalagi bagi yang beranggapan bahwa kehidupan ini adalah medan persaingan. Bagi kelompok pemikiran kapitalis, kelompok yang dianggap memiliki eksistensi adalah yang mampu memenangkan persaingan. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas menjadi orang yang sulit untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi mereka.

Paradigma terhadap penyandang disabilitas sebenarnya telah bergeser, mulai dari traditional model yang berbasis kesukarelaan, sampai dengan inclusion model, yang menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan paradigma ini juga perlu diikuti oleh bidang informasi dan komunikasi publik, dengan memberikan layanan yang bersifat inklusif. Pembangunan Inklusif Disabilitas membutuhkan sinergi, harmonisasi, dan efektivitas program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Layanan informasi dan komunikasi publik yang bersifat inklusif ini sebenarnya telah berjalan di beberapa institusi pemerintah dengan mengedepankan konsep no one left behind. Pemerintah telah memastikan keberadaan layanan informasi dan komunikasi publik inklusif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Implementasi dari PP ini dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan kementerian atau lembaga dan perangkat daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan daerah. Hak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan komunikasi dan informasi publik juga diperkuat dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang menegaskan kewajiban Badan Publik memberikan layanan Informasi Publik bagi penyandang disabilitas. Pasal tersebut menyatakan, Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan atau braille.****(dfn)



OKSIGEN YANG DIHASILKAN OLEH BERBAGAI JENIS POHON

Pohon menghasilkan oksigen yang diproduksinya melalui proses fotosintesis. Namun, tahukah kamu bahwa tidak semua jenis pohon menghasilkan jumlah oksigen yang sama. Berapa banyak oksigen yang dihasilkan oleh berbagai jenis pohon? Berikut adalah jumlah oksigen yang dihasilkan oleh pohon akasia, sycamore, beech, sonokeling, bambu, cemara, dan maple!

1. Pohon akasia

Akasia adalah pohon yang banyak tumbuh di daerah Afrika dan Australia. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, akasia memiliki batang pipih yang bertindak sebagai daun untuk melakukan proses fotosintesis. Akasia menyerap oksigen, air, dan cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa dan sekitar 143,33 kilogram oksigen dalam sehari.

2. Pohon sycamore

Pohon sycamore atau *Platanus occidentalis* adalah pohon besar dengan kulit kayu yang berbintik. Pohon sycamore tidak menghasilkan terlalu banyak oksigen. Dilansir dari Science Focus, pohon sycamore menghasilkan sekitar 100 kilogram oksigen per tahun.

3. Pohon beech

Pohon beech atau *fagus* adalah pohon yang kayunya kerap digunakan sebagai kayu bakar karena menghasilkan nyala api yang terang dan tahan lama. Pohon beech banyak ditemukan di Eropa dan dapat menghasilkan sekitar 118 kilogram oksigen per tahun.

4. Pohon sonokeling

Pohon sonokeling atau *Dalbergia latifolia* adalah pohon yang tumbuh liar tanah Jawa dan menjadi salah satu penghasil kayu terbaik. Pohon sonokeling menghasilkan oksigen dalam jumlah besar, yaitu sekitar 207,33 kilogram per harinya.

5. Pohon bambu

Bambu dikenal sebagai pohon dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Bambu juga menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Diperkirakan, satu pohon bambu dewasa menghasilkan lebih dari 300 kilogram oksigen dalam satu tahun.

6. Pohon cemara

Pohon cemara adalah banyak digunakan untuk menghias rumah saat natal tiba. Pohon cemara mampu menyerap sekitar 220 kilogram karbon dioksida dan menghasilkan sekitar 450 kilogram oksigen setiap tahunnya.

7. Pohon maple

Pohon maple atau *acer* adalah salah satu jenis pohon yang menghasilkan paling banyak oksigen. Diperkirakan, satu daun pohon maple dapat memproduksi sekitar lima milligram oksigen dalam satu jam. Sedangkan, satu pohon maple dapat memiliki sekitar 100 ribu daun pada kondisi yang baik. Artinya, satu pohon maple dapat menghasilkan sekitar 100 kilogram oksigen hanya dalam waktu satu jam saja.



PERAN PENTING PSIKOLOGI DALAM PERILAKU ORGANISASI

Oleh : Novira Khairunnisa

Dalam suatu organisasi terjadinya konflik adalah hal yang tidak terhindarkan karena di dalamnya terdapat berbagai macam kepala dengan pemikiran, perilaku, dan sifat yang berbeda-beda. Konflik-konflik tersebut dapat terjadi baik dikalangan bawah, menengah maupun atas. Di sini lah pentingnya untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan prinsip psikologi organisasi.

Penyelesaian konflik yang cepat dan efektif akan menciptakan karyawan yang sehat dan bahagia serta memiliki struktur organisasi yang kuat. Sayangnya, saat ini masih ada Instansi atau Perusahaan yang meremehkan pentingnya pemahaman serta implementasi psikologi organisasi padahal ini salah satu bagian penting dalam menciptakan lingkungan organisasi yang sehat dan berjalan efektif. Psikologi organisasi dapat membantu dalam merencanakan kebijakan hingga mengembangkan strategi Instansi atau perusahaan untuk masa depan.

Setiap Instansi atau perusahaan apapun industrinya, pasti memiliki masalah, namun tak seharusnya instansi atau perusahaan tersebut membiarkan masalah tersebut berlangsung lama. Siapa yang menangannya? Mereka yang memiliki keahlian dalam psikologi organisasi.

Berdasarkan American Psychological As-

sociation (APA), psikologi industri organisasi yang merupakan cabang dari psikologi merupakan studi ilmiah tentang perilaku manusia dalam organisasi dan tempat kerja. Spesialisasi ini berfokus pada prinsip-prinsip dari perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja.

Dari sisi ilmu, psikologi organisasi merupakan ilmu terapan dan penelitian teoritis yang berakar dari psikologi eksperimental. Psikologi organisasi memiliki sejumlah sub-area seperti interaksi manusia dan komputer, psikologi personalia, dan human factor. Sedangkan dari sisi industri, psikologi organisasi erat kaitannya dengan proses mempertemukan individu atau kandidat yang sesuai dengan pekerjaan tertentu. Hal ini berkaitan juga dengan peningkatan produktivitas kerja dan masalah terkait seperti kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Dari sisi profesi, psikologi organisasi merujuk pada psikologi personalia.

Namun dari segi mana pun sisinya, psikologi organisasi memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami perilaku manusia di tempat kerja serta bagaimana organisasi memengaruhi perilaku individu dan faktor-faktor yang memengaruhinya adalah struktur organisasi, norma sosial, gaya manajemen,

dan ekspektasi peran.

Inilah mengapa peran psikologi organisasi merupakan hal yang krusial dalam membangun sebuah organisasi yang dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas dalam menjalani sebuah organisasi. Pasalnya, dalam setiap organisasi pasti terdapat masalah, seperti perselisihan karyawan, semangat kerja yang rendah, dan rotasi karyawan yang tinggi. Namun permasalahan-permasalahan ini dapat luput dari pandangan pimpinan-pimpinan karena memang permasalahan tersebut bukanlah fokus dari pekerjaan mereka.

Kehadiran psikolog organisasi memberikan perspektif baru dalam menyelesaikan masalah. Ketika menyelesaikan masalah, ia mungkin bertanya seberapa efektif komunikasi antara rekan kerja atau antara karyawan, tim manajemen maupun pimpinan-pimpinan. Sehingga ia bisa mengambil keputusan dan menyarankan manajemen untuk mendukung resolusi konflik.

Bahkan ia bisa memberikan pelatihan, memiliki pengetahuan yang luas tentang penelitian terkini tentang dinamika tempat kerja, serta dapat menyusun strategi untuk mengembalikan organisasi ke jalurnya. Pentingnya peran psikolog organisasi karena ia memiliki ilmu yang mumpuni dalam setidaknya enam bidang subjek utama dalam sebuah organisasi. Pertama, dalam hal seleksi karyawan melibatkan pengembangan penilaian seleksi karyawan, seperti tes penyaringan untuk menentukan kandidat telah sesuai dengan syarat pekerjaan atau tidak. Kedua, ergonomi, psikolog organisasi dengan subyek ergo-

nomi akan membuat perancangan atau desain alat-alat untuk memaksimalkan kinerja dan meminimalkan cedera. Ketiga, pengembangan organisasi, dalam hal ini psikolog organisasi akan membantu organisasi melalui program-program untuk memperbaiki perilaku organisasi dan struktur organisasi. Keempat, manajemen kinerja, dimana ia akan mengembangkan penilaian dan teknik untuk menentukan kinerja karyawan telah dilakukan dengan baik. Kelima, kehidupan kerja, dalam area ini psikolog akan berfokus meningkatkan kepuasan karyawan dan memaksimalkan produktivitas para karyawan. Ia juga dapat menawarkan cara atau program agar karyawan dapat bekerja lebih menguntungkan bagi organisasi sekaligus kualitas hidup meningkat di tempat kerja. Keenam, pelatihan dan pengembangan, psikolog akan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu serta mengevaluasi program pelatihan karyawan. Namun sebelum itu, psikolog organisasi akan menentukan masalah spesifiknya yang terjadi di dalamnya.

Kehadiran psikologi organisasi di tengah tempat kerja bukan tanpa tujuan. Dengan tenaga ahli psikologi organisasi dapat memberikan solusi atas masalah yang terjadi serta dapat merancang, mengerjakan, dan menganalisis penelitian terkait interaksi di tempat kerja. Semua ini demi meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan.





PERPRES 112/2022 DITANDATANGANI, PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK RENDAH EMISI DIMULAI

Oleh : Fauziah

Untuk mempercepat ketersediaan energi baru dan terbarukan (EBT), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Pembangkit Listrik. Dengan Peraturan Presiden 112/2022, Presiden Republik Indonesia menghentikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Berdasarkan Peraturan Presiden 112/2022 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 September 2022, pembangunan pembangkit listrik dilakukan secara selektif, dan pembangunan pembangkit listrik yang dibeli oleh EBT dimaksudkan untuk berjalan beriringan.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Perpres 112/2022, Menteri menyusun rencana aksi sehubungan dengan transisi energi sektor ketenagalistrikan untuk mempercepat berakh-

irnya masa operasi PLTU sesuai dengan perencanaan khusus sektor dokumen. Kemudian Pasal 3 ayat (3) Perpres menyebutkan bahwa rencana percepatan tersebut pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pengurangan emisi gas rumah kaca PLTU;
- b. strategi percepatan pengakhiran masa operasional PLTU; dan
- c. keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden 112/2022 mengatakan bahwa pembangunan PLTU baru dilarang, kecuali:

- a. PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini; atau
- b. PLTU yang memenuhi persyaratan:
 1. Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam

Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran energi terbarukan; dan
3. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050

Penghentian dan pembangunan PLTU secara selektif merupakan salah satu program untuk memenuhi komitmen penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% di tahun 2030, atau bisa lebih tinggi dengan kerja sama dengan pihak internasional, serta mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.

Megalopolitan.antaranews.com mengabarkan bahwa dalam Perpres tersebut disebutkan penetapan tarif didasarkan pada nilai keekonomian. Kebijakan saat ini menjadi acuan bagi BPP yang diterapkan di daerah.

Terkait penentuan tarif yang ditentukan dalam Perpres berdasar pada nilai keekonomian. Prinsip yang berjalan sekarang, yaitu patokan BPP yang berlaku di wilayah tersebut. Dadan mengungkapkan, Pemerintah berusaha mengombinasikan seluruh sumber EBT supaya bisa dimanfaatkan di tanah air agar EBT menjadi sumber energi utama khususnya pembangkit



listrik di dalam negeri.

Berangkat dari pemahaman ini, Perpres 112 tahun 2022 memang disusun dengan pendekatan nilai keekonomian per jenis pembangkit. Penentuan tarifnya dilakukan dengan memperhatikan masukan dari para stakeholder. Pemerintah bertujuan untuk menghubungkan semua sumber EBT untuk keperluan rumah tangga sehingga EBT menjadi sumber energi utama, terutama pembangkit listrik dalam negeri.

Perpres 112/2022 disusun dengan pendekatan nilai ekonomis untuk setiap jenis pembangkit. Tarif ditentukan dengan memperhatikan kontribusi pemangku kepentingan. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga daya saing Indonesia. Pemerintah mendukung peningkatan penggunaan EBT, dukungannya berada pada tingkat keuangan yang dapat diterima dan sistem staging dilakukan.

Sistem staging adalah tarif yang berlaku akan berubah dalam beberapa tahapan. Bisnis pembangkit listrik menerima harga yang lebih tinggi dari rata-rata selama 10 tahun pertama, jika pengembalian investasi yang digunakan untuk membangun pembangkit/pemasangan terpenuhi atau selama periode pengembalian, yang biasanya dalam 10 tahun.

Pada tahap selanjutnya, tarif akan diturunkan karena tidak perlu mengembalikan investasi, dalam hal ini negara akan menerima harga yang lebih rendah nanti, sedangkan pengembang pembangkit listrik akan ditawarkan bagian yang adil setelah lebih dari 10 tahun.



Energi Baru Terbarukan Tidak Lagi Menjadi Energi Alternatif

Oleh : Nadia Talita

Tahukah kamu bahwa energi baru terbarukan (EBT) menjadi topik perbincangan yang cukup seksi pada dewasa ini? Energi fosil atau energi dari hasil pembakaran minyak, gas bumi, dan batu bara sebagai energi yang telah lama dan paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dunia akan berangsur-angsur habis dan butuh waktu yang begitu lama untuk menghasilkannya lagi. Akibatnya, demand yang semakin tinggi membuat harga komoditas energi fosil semakin melonjak sedangkan cadangan semakin menipis. Selain kelangkaan dan harga yang meroket tinggi, pembakaran sumber energi fosil juga terbukti dapat menyebabkan pencemaran udara, degradasi tanah, polusi air, pemanasan global, hingga perubahan iklim. Oleh sebab itu, EBT dirasa mampu menjadi kunci untuk menggantikan energi fosil dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.

Penggunaan EBT terus didorong oleh pemerintah dan masyarakat dunia, bahkan pada

pertemuan tingkat tinggi G20 yang dipresidensi oleh Indonesia, transisi energi menjadi sebuah tanda capaian hasil konkret, dimana Amerika Serikat, Jepang, institusi keuangan dunia, bahkan pihak swasta ikut mendukung ide brilian ini dengan menyokong sejumlah dana untuk membantu Indonesia mengurangi emisi karbon secara signifikan serta memperluas jaringan pembangkit listrik dari EBT. Bahkan dalam Deklarasi Bali tersebut, terdapat 2 poin khusus dari 52 poin kesepakatan kepala negara G20 yang terkait dengan sektor energi (www.ebtke.esdm.go.id:2022). Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan pengembangan EBT agar dapat mencapai target 23% EBT pada bauran energi primer nasional tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). RUEN sendiri merupakan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan rencana pengelolaan ener-

gi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan kemandirian yakni terjaminnya ketersediaan energi dengan pemanfaatan potensi sumber dalam negeri secara maksimal dan ketahanan energi nasional yakni memberikan akses energi dalam jangka panjang kepada masyarakat dengan harga terjangkau dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Mengutip pernyataan Rida Mulyana selaku Direktur Jenderal Energi Baru Kementerian ESDM (2017) pada sesi diskusi panel pada acara Pertambangan dan Energi Expo 2017 di Jakarta bahwa "Indonesia memiliki sumber daya EBT yang lengkap dari langit, bumi, hingga air. Jadi, tunggu apa lagi untuk segera menjadi EBT yang utama. Pemanfaatan energi terbarukan is a must, tidak lagi sekedar alternatif tetapi harus menjadi mainstream". Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya dan memiliki Potensi EBT yang cukup besar seperti mini/mikro hidro, biomass, energi surya, energi angin dan energi nuklir. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis dalam bauran energi primer nasional dengan menambah kapasitas terpasangnya Pembangkit Listrik Mikro Hidro menjadi 2,846 MW pada tahun 2025, kapasitas terpasang angin (PLT Bayu) sebesar 0,97 GW pada tahun 2025, surya 0,87 GW pada tahun 2024, dan nuklir 4,2 GW pada tahun 2024, bahkan pemerintah telah menambah kapasitas terpasangnya Biomasa 180 MW pada tahun 2020 lalu (www.esdm.go.id:2008).

Hanya saja dalam percepatan penggunaan EBT sebagai energi utama terdapat sejumlah hambatan dan tantangan seperti harga EBT yang dinilai relatif lebih mahal dibandingkan dengan pembangkit konvensional, infrastruktur yang belum memadai dan membutuhkan biaya yang cukup besar, jaminan terpenuhinya pasokan, pembangkit EBT dengan biaya rendah yang terletak di daerah konservasi masih jauh dari pusat beban sehingga membutuhkan waktu yang lama dari segi perizinan, kendala geografis, hingga keadaan kahar.

Pemerintah terus berupaya untuk menghadapi hambatan dan tantangan yang berhubungan dengan strategi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah untuk percepatan pengembangan EBT adalah dengan mendorong peningkatan kapasitas unit-unit PLT (Pembangkit Listrik Tenaga) EBT yang sudah ada dan proyek EBT-KE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) yang sedang berjalan sesuai RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik). Strategi kedua dengan cara mengupayakan penciptaan pasar EBT melalui program Renewable Energy Based Industrial Development (REBID) dan Renewable Energy Based Economic Development (REBED) seperti contohnya pengembangan klaster ekonomi-maritim di pulau kecil dengan memanfaatkan sistem pembangkit listrik hybrid yang terdiri dari energi surya dan angin dengan baterai dan biomassa. Selain itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses energi kepada masyarakat langsung melalui pendanaan APBN (LTSHE, PJU TS, Biogas Komunal, dan PLTS Atap) dan memudahkan akses kepada pendanaan yang kompetitif. Terakhir, Pemerintah juga menerbitkan kebijakan pendukung untuk memperbaiki tata kelola dengan memberikan kemudahan perizinan, penerapan sistem perizinan online di KESDM, perbaikan data dan informasi, pelaksanaan monev dan fasilitasi problem solving untuk proyek-proyek panas Bumi, dan perbaikan standar dan sertifikasi SDM (www.ebtke.esdm.go.id:2019).





HARI KESEHATAN NASIONAL 2022

Oleh : Fauziah

September lalu, dunia kesehatan dihebohkan dengan munculnya gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). GGAPA adalah kondisi di mana ginjal berhenti bekerja secara tiba-tiba. Hal ini dikatakan akut karena hanya berlangsung dalam beberapa jam atau hari. Dengan kata lain, penyakit ini tidak menimbulkan masalah permanen jika ditangani dengan cepat. Diagnosis gangguan ginjal akut yang 70 persennya karena senyawa kimia berbahaya etilena glikol, dietilen glikol dan etilen glikol butyl ether.

Untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan penanganan kepada pasien GGAPA, Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menerbitkan Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal

Akut Progresif Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) Pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02./2/1/3305/2022.

Dilansir dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, pedoman tersebut memuat serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam melakukan penanganan terhadap Pasien Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal sesuai dengan indikasi medis. Kemenkes secara aktif terus melakukan pemantauan dan pelacakan kasus di masyarakat guna menemukan kasus gagal ginjal akut sedini mungkin. Salah satunya dengan melaporkan penyakit gagal ginjal akut pada anak maupun penyakit menular lainnya melalui Sistem Kawaspadaan Dini dan Respon Event Baeed Sur-

veillance (SKDREBS)/ Surveilans Berbasis Kejadian (SBK).

LALU, APA KAITAN HARI KESEHATAN NASIONAL DENGAN GGAPA?

Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati pada tanggal 12 November setiap tahunnya. Hal ini mengacu pada momen keberhasilan pemberantasan malaria pada tahun tersebut. Disebutkan bahwa pada era tahun 50-an, penyakit malaria menjadi wabah penyakit yang banyak diderita masyarakat Indonesia.

HKN tahun ini mengusung tema "Bangkit IndonesiaKu Sehat Negeriku". Peringatan HKN ke-58 di tahun 2022 ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih kuat yang akan mampu menghadapi goncangan seperti pandemi yang baru saja kita alami.

Hari Kesehatan ini membawa pesan bahwa di masa transisi pandemi ke endemi ini kita tidak boleh lengah, seluruh komponen bangsa; masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta berperan serta dalam upaya menjaga kesehatan, memprioritaskan promotifpreventif dan semakin menggalakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini merupakan tantangan tersendiri di bidang kesehatan setelah fokus pada penanganan pandemi COVID-19, kini dihadapkan pada penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM). Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan praktisi turut ambil bagian dalam peringatan HKN untuk mendukung pembangunan kesehatan.

Kini, setelah 58 tahun dirayakan, Indonesia masih berjuang untuk menghadapi berbagai masalah kesehatan. Tiga yang paling lekat belakangan adalah pandemi COVID-19, hepatitis akut misterius, hingga gagal ginjal akut. Belum lagi masalah kesehatan lainnya yang belum kunjung usai. Mulai dari tingginya prevalensi kanker, stroke, atau permasalahan jantung di Indonesia. Masalah kesehatan silih berganti, kerap muncul dan tenggelam dengan berbagai temuan lama maupun baru.

Dilansir dari liputan6.com, Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global, Dicky Budiman mengungkapkan bahwa momentum ini harusnya menyadarkan kita semua, begitu penting di era pandemi ini, kita memperingati HKN bahwa kesehatan itu bukan hanya masalah masa kini. Tapi masalah masa depan. Keseha-

tan adalah investasi masa depan. Kesehatan itu harus mewarnai setiap kebijakan yang ada di pemerintahan. Kesehatan itu sangat krusial untuk bisa membuat jalannya aktivitas secara optimal dengan tujuan pembangunan nasional.

Kesehatan sendiri akan mempengaruhi keberhasilan berbagai pihak di sektor lain. Tugas yang masih harus diselesaikan oleh sektor kesehatan pun masih panjang. Bila berkaca pada masalah gagal ginjal akut yang sedang hangat, pemerintah sebenarnya masih belum berhasil dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat. Salah satu hal yang memprihatinkan dalam konteks gagal ginjal akut adalah mayoritas obat yang tercemar merupakan obat murah. Obat tersebut kemudian banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah kebawah dan punya keterbatasan akses pada layanan kesehatan dari sisi finansial dan demografis.

Kementerian Kesehatan sebagai sektor atau leading sector dalam hal pemenuhan kesehatan di Indonesia harus menjadikan momentum HKN ini sebagai introspeksi atas perannya, atas capaian pembangunan kesehatannya, dan apa yang akan dilakukan untuk perbaikan untuk kesehatan atau sektor kesehatan. Selain itu, tak dapat menutup mata pula bahwa Indonesia masih memiliki capaian positif yang sudah diraih dalam hal kesehatan. Salah satunya Indonesia sudah berhasil melaksanakan Health Working Group (HWG) dalam KTT G20. Padahal situasi sedang tidak mudah.



**Bangkit IndonesiaKu
Sehat Negeriku**

Peringatan
Hari Kesehatan Nasional ke-58





KORPRI Melayani, Berkontribusi
dan Berinovasi Untuk Negeri

Memperingati

HUT KORPRI